

TESIS
PENEGAKAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN
DI MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus Kepolisian Resor Kerinci)

*Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Program Magister Hukum*



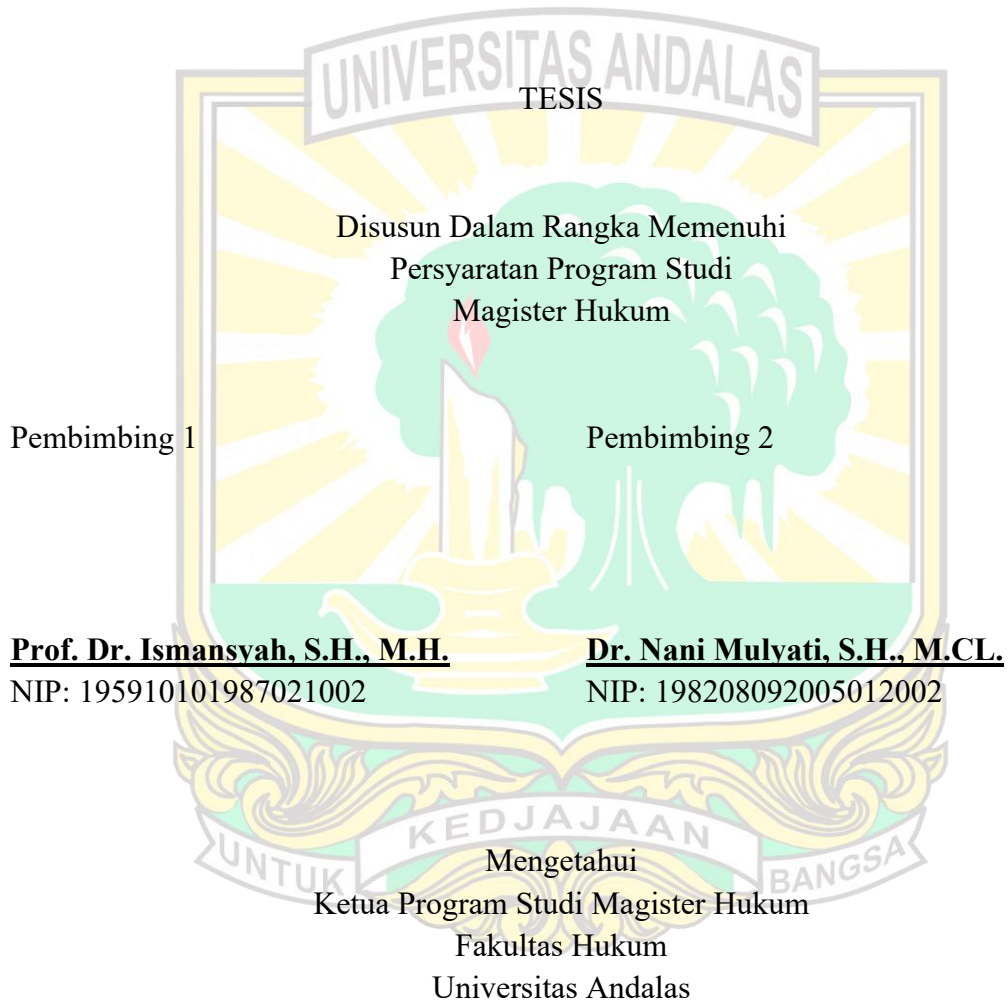
Oleh :
HAFIZA YETTI
NIM: 2320112003

Pembimbing:
Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H
Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CI

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PENEGAKAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN
DI MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus Kepolisian Resor Kerinci)



LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis ini diajukan oleh:

Nama Mahasiswa : Hafiza Yetti
Nim : 2320112003
Program Studi : Magister Ilmu
Judul Tesis : Penegakan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Sosial (Studi Kasus Kepolisian Resor Kerinci)

Telah berhasil dipertahankan Dewan Penguji Pada Hari Sabtu, 19 April 2025 dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas.

**Menyetujui
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.
NIP: 195910101987021002

Dr. Nani Mulvati, S.H., M.Cl.
NIP: 198208092005012002

Komisi Penguji

Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.
Nip. 196212051987022001

Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M.
Nip. 196212311989011002

Dr. Edita Elda, S.H., M.H.
Nip. 198601252009122004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas**

**Ketua Program Studi Magister
Hukum Universitas Andalas**

Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H.
Nip: 196807231993021001

Dr. Yasniwati, S.H., M.H.
Nip: 197211132005012001

**PENEGAKAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN
DI MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus Kepolisian Resor Kerinci)**

(Hafiza Yetti, BP.2320112003, 155 Halaman, Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Andalas, 2025)

ABSTRAK

Pencemaran nama baik melalui media sosial termasuk ke dalam kejahatan informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik digunakan untuk melindungi korban pencemaran nama baik, Permasalahan dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimanakah penafsiran pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial dalam hukum pidana? 2) Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kota Sungai Penuh? 3) Apakah kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial di Kota Sungai Penuh? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara penyidik dan Lokasi penelitian di Kepolisian Resor Kerinci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penafsiran terhadap pencemaran nama baik dalam KUHP yang masih berlaku, KUHP Baru, UU ITE Lama, UU ITE Baru, dan Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023. Pengaturan KUHP yang masih berlaku lebih umum, sementara KUHP Baru dan UU ITE Baru lebih jelas mengatur pencemaran nama baik, Putusan MK juga memberikan adanya kepastian hukum. 2) Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di Polres Kerinci menunjukkan bahwa Penegakan hukum tentang pencemaran nama baik melalui media sosial diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik namun pada tahap penyidikan dari laporan yang masuk dari tahun 2022-2024 terdapat 13 kasus dan 4 kasus yang diproses diselesaikan secara mediasi. 3) Kendala yang dihadapi penyidik Kepolisian Resor Kerinci dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yaitu masalah bukti, keterbatasan keahlian teknis di bidang forensik digital, minimnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, keterbatasan anggaran dan sumber daya, perbedaan budaya dan sosial yang ada di masyarakat. Upaya yang dilakukan penyidik yaitu peningkatan koordinasi dengan platform media sosial, pelatihan dan penyuluhan dengan masyarakat, penggunaan teknologi dan alat forensik digital, penegakan hukum yang tegas dan transparan, dan peningkatan keterampilan dan sumber daya penyidik.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Penyidikan, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial*

**LAW ENFORCEMENT AT THE INVESTIGATION STAGE OF THE CRIME
OF DEFAMATION THAT WAS COMMITTED ON SOCIAL MEDIA
(Kerinci Resort Police Case Study)**

(Hafiza Yetti, BP.2320112003, 155 pages, Master of Law Study Program, Andalas University, 2025)

ABSTRACT

Defamation through social media is included in information crimes and Electronic Transactions regulated in the Criminal Code and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as last amended by Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions used to protect victims of defamation, The problems in this thesis are: 1) How is the interpretation of defamation committed on social media in criminal law? 2) How is the enforcement of criminal law against perpetrators of criminal acts of defamation through social media in Sungai Penuh City? 3) What are the obstacles and efforts in enforcing the law against criminal acts of defamation committed on social media in Sungai Penuh City? This study uses an empirical legal method, is descriptive in nature using primary data obtained from interviews with investigators and the research location at the Kerinci Police Resort. The results of the study show that: 1) The interpretation of defamation in the Criminal Code that is still in effect, the New Criminal Code, the Old ITE Law, the New ITE Law, and the Constitutional Court Decision No. 78/PUU-XXI/2023. The provisions of the Criminal Code that are still in force are more general, while the New Criminal Code and the New ITE Law more clearly regulate defamation. The Constitutional Court's decision also provides legal certainty. 2) Criminal law enforcement against criminal acts of defamation at the Kerinci Police shows that law enforcement regarding defamation through social media is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, but at the investigation stage of reports received from 2022-2024 there were 13 cases and 4 cases that were processed were resolved through mediation. 3) Obstacles faced by Kerinci Police investigators in enforcing the law on criminal acts of defamation through social media are problems with evidence, limited technical expertise in the field of digital forensics, lack of legal awareness among the public, limited budget and resources, cultural and social differences in society. Efforts made by investigators include increasing coordination with social media platforms, training and counseling with the community, use of digital forensic technology and tools, firm and transparent law enforcement, and increasing the skills and resources of investigators.

Keywords: Law Enforcement, Investigation, Defamation, Social Media